

PENGEMBANGAN PARADIGMA PENDIDIKAN PEMANUSIAAN MELALUI PENDIDIKAN SENI¹

Kasiyan

Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

An anxiety, at the same time, a big criticism of the education practice and system in the new era order, which is stile processing, are that the substance of the orientation aim which origanally is directed to the effort of creating an entire Indonesian human being has never got a justification proof on its achievement in the society.

The empiric fact shows that general education product tends to produce a typology of the present society culture paranoid with the human beings who have qualified pathology mental and with some dominated characteristics, such us aggressive, hypocrite, hedonism, materialistic, sexist, discriminative, chauvinist, unsensitive, uncreative, and amoral and other attributes which are congruent with their valid meaning. One of the causes is the reality/the fact happen in our education paradigm that is contaminated by a ratio monolitism of modern-capitalistic. So, it makes the entire education system reduced soo far from the substance of education meaning as a process, it becomes an oney technique-administrative problem, and it is subordinated into the capitalism mainstream and overtaken time of the developmentalism jargon.

Therefore, a construction of a new simultaneous awareness which tries to clear the exist education in this capitalistic/capital era is something crumpled and crucial. Hence, the various outlets and the collective attitudes toward the reality of the educational absurdity can be excavated. "Humanization education paradigm", with its main pillars constructor, like by concerning with sharpening the education based on arts and literature is an offer of outlet solution alternatives which can be a simultaneous contemplative discourse.

Key words: *education, humanization, values, arts, and literature.*

Abstrak

Satu hal keprihatinan dan sekaligus merupakan kritik besar terhadap sistem dan praksis pendidikan di era orde baru dan ternyata masih terus berproses sampai saat ini, yakni ketika substansi orientasi tujuannya yang semula diarahkan bagi upaya pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, ternyata tidak pernah mendapatkan bukti pembenar ketercapaiannya di masyarakat.

¹ Tulisan ini Dimuat sebagai Bagian dari Buku *Bunga Rampai Kajian Seni Rupa*, dalam Rangka Purna Tugas Prof. Suwaji Bastomi. Penerbit Universitas Negeri Semarang Press, Tahun 2003.

Betapa fakta empiris menunjukkan bahwa, produk pendidikan secara umum berkecenderungan menghasilkan tipologi kultur masyarakat kekinian yang paranoid, dengan manusia-manusia di dalamnya berkualitas mental patologis, dengan dominasi sifat-sifat diantaranya adalah: agresif, hipokrit, hedonis, materialis, seksis, diskriminatif, *chouvinis*, tidak kreatif, amoral, serta sekeranjang atribusi lain yang sebangun maknanya. Hal ini diantaranya lebih disebabkan oleh kenyataan dari paradigma pendidikan kita selama ini yang begitu terkontaminasi monolitisme rasio modern-kapitalistik, sehingga mengakibatkan, keseluruhan sistem pendidikan yang ada, telah demikian jauh teredusir, dari substansi maknawi pendidikan sebagai proses humanisasi, menjadi semata-mata persoalan teknis-administratif, yang tersubordinasi ke dalam pengarusutamaan (*mainstream*) kapitalisme dan jargon *developmentalisme*.

Oleh karena itu merupakan sesuatu hal yang amat mendesak dan krusial kiranya, sebuah konstruksi kesadaran baru bersama, yang mencoba menjernihi dari keberadaan pendidikan di era kapital ini, sehingga akan dapat digali berbagai alternasi *outlet*/pelepasan serta penyikapan kolektif bagi kenyataan aburditas dunia pendidikan tersebut. '*Paradigma pendidikan pemanusiaan*', dengan pilar-pilar pengkonstruksi utamanya diantaranya adalah dengan mempertajam pendidikan yang berbasiskan seni dan sastra, kiranya merupakan sebuah tawaran solusi *outlet* yang dapat dijadikan wacana permenungan bersama.

Kata kunci: pendidikan, pemanusiaan, nilai-nilai, seni, dan sastra.

Pengantar

Memasuki milenium ketiga, banyak persoalan krusial-strategis dalam dunia pendidikan kita yang perlu dan amat mendesak untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif. Salah satu di antara yang cukup mengedepan kiranya adalah persoalan kenyataan dunia pendidikan kita yang ternyata telah dengan asertif transparan menunjukkan kegagalannya membentuk manusia-manusia yang utuh, dengan segenap kualitas kombinasi pencerahan (*enlightened*) fisik dan psikhis dalam kesetimbangan yang *equilibrium*, sebagaimana hal itu menjadi *concern* amanat dari tujuan pendidikan nasional.

Banyak indikator secara operasional di masyarakat, yang sangat mudah untuk ditemukeni, yang kemudian akan segera memberikan verifikasi pembenar,

perihal kegagalan dari sistem pendidikan kita selama ini sebagaimana dimaksud. Betapa kita menyaksikan bahwa konstruksi sosial di masyarakat kita sekarang ini, kecenderungannya menunjukkan gejala dekadensi moral dan peradaban yang amat akut. Kecenderungan ekspresi dari wacana dan dinamika sosial yang ada sekarang ini, bukankah tak pernah beranjak jauh dari tematik kultur *paranoid-patologis*, dengan kualitas manusia-manusia di dalamnya yang demikian kental dengan atribusi absurditas invalidnya, yakni: sangat agresif, hedonis, materialis, seksis, hipokritis, diskriminatif, amoral, tidak sensitif, tidak kreatif, dan sekeranjang sampah moralitas invalid lainnya. Melihat kenyataan sosial tersebut, maka dapat diungkapkan bahwa pada dimensi tertentu wacana pendidikan segera menampakkan ketidakberdayaannya untuk berperan sebagai sebuah pranata pencerahan, sebagaimana filosofi yang sejak awal melandasinya.

Justifikasi vonis sumbang yang berkonotasi mengkorelasikan perihal produk manusia dan budayanya di masyarakat dengan institusi pendidikan tersebut kiranya bukanlah sesuatu yang berlebihan, ketika kita perspektifkan keberadaan dan peranan institusi pendidikan itu sendiri di masyarakat sejak dari dulu. Antara pranata pendidikan dengan masyarakat berikut kebudayaannya, memang mempunyai hubungan yang saling berkaitan (*interconnected*), dengan bukti bahwasannya, mulai dari jaman konservatif tradisional sampai di era posmodern saat ini, format dan sistem sekolah dalam bingkai pendidikan formal masih begitu dipercaya, dan bahkan signifikan eksistensinya menjadi satu keniscayaan harapan bagi pemberdayaan (*empowerment*) dan pencerahan (*enlightment*) masyarakat dan berikut peradabannya. Dalam pandangan Durkheim

(dalam Dayati, 1999) ditegaskan bahwa keberadaan sekolah atau institusi pendidikan formal di masyarakat lebih diperuntukkan agar masyarakat itu sendiri dapat tetap tegak hidup (*survive*).

Sindhunata dalam pengantar untuk bukunya *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi* (2000:5) pernah mengungkapkan beberapa *critical point* menarik, perihal problematika dunia pendidikan kita sebagaimana terkait dimaksud. Di antaranya adalah bagaimana kita, para pendidik, lembaga pendidikan, dan siapapun yang mempunyai keprihatinan dalam bidang pendidikan, mesti menyikapi persoalan kemajemukan di negara yang sedang belajar demokrasi ini? Bagaimana pula dunia pendidikan menghadapi arus globalisasi yang sudah merembes masuk di setiap sudut kehidupan kita? Gambaran manusia macam apakah yang mesti diperjuangkan dalam pendidikan agar anak didik menjadi manusia yang bebas, mandiri, toleran, solider, dan bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan krusial tersebut urgensinya akan dapat ditemukan, manakala pendidikan diperspektifkan merupakan bagian dari proses pembudayaan (Tilaar, 1999).

Tulisan berikut akan mencoba mengelaborasi berbagai hal terkait dari kenyataan carut marutnya pranata sosial dalam kaitannya dengan dimensi pendidikan dimaksud, dan pada penajaman tertentu yang paradigmatik, mencoba membangun alternasi *outlet*, yaitu dengan mereartikulasi urgensi nilai-nilai pendidikan yang berbasiskan seni dan sastra, sebagai wacana yang relatif efektif bagi upaya pengembangan “*pendidikan pemanusiaan*”.

Pengarusutamaan Tesis Modern-Kapitalistik dan *Qou Vadis* Pendidikan

Dalam tahun-tahun terakhir ini, fenomena agresivitas massa dan sosial di negeri ini begitu menggejala, baik di tingkat kaum intelektualnya dan terlebih lagi pada level di basis akar rumput (*grass root*). Demikian juga halnya dengan prototipe kultur masyarakat materialisme dan hedonisme, di mana merupakan konsep yang dilahirkan dari wacana ekonomi libido (*libydinal economy*) juga mengundang banyak keprihatinan sekarang ini. Kultur masyarakat kita tersebut telah melahirkan semacam paradigma peradaban tanpa panduan mata hati (nurani). Fenomena inilah yang kemudian menyuburkan semaian dari absurditas moral manusia pendukungnya, sehingga praktek-praktek penyimpangan perilaku yang pada mulanya secara sangat substansial amat ditabukan, justru menjadi panorama *landscape* keseharian dan kesadaran sosial yang sangat biasa maknanya.

Bukankah kita sudah tidak begitu tergetar lagi manakala mendengar, penguasa yang korup, hakim yang mafia, aktivis yang memperjualbelikan perjuangan, pengusaha yang maling, antarsuku yang saling bunuh, dan sederet pencandraan patologi sosial masyarakat kita lainnya. Mengapa itu semua bisa terjadi pada bangsa kita, dan kita pun bahkan telah menjadi amat apatis menyikapinya. Jawaban yang komprehensif akan selalu tidak berdimensikan tunggal tentunya.

Namun demikian dalam dimensi tertentu, maka dunia pendidikan kita dengan segala ekspresi kinerjanya seperti selama ini, banyak pihak yang sepakat turut punya andil dalam mengkonstruksi wacana sosial tersebut. Adimassana

(2000:30) memberikan penajaman bahwa, kenyataan sosial tersebut merupakan akumulasi akibat dari kegagalan sektor pendidikan kita, terutama dalam melaksanakan “pendidikan nilai”.

Dari sisi pendidikan nilai, sebenarnya krisis ekonomi yang sedang kita alami sekarang ini dapat mengandung berkat yang tersembunyi (*blessing in disguise*). Krisis ini telah memberi kesempatan bagi terkuaknya tabir kebohongan, keserakahan, kelicikan, dan berbagai bentuk pelanggaran moral yang selama ini telah terjadi (J. Sudarminta dalam Atmadi dan Setyaningsih, 2000).

Pendidikan nilai sejak jaman orde baru sampai sekarang telah jatuh dalam pengajaran nilai yang indoktrinatif-normatif, dan karenanya rentan terhadap wacana kedangkalan. Semboyan latin *non sed scholae sed vitae discimus* (kita belajar bukan demi sekolah tetapi demi hidup), tampaknya tidak populer lagi, justru sebaliknya, yakni *non vitae sed scholae discimus* (kita belajar bukan demi hidup tetapi demi sekolah) menjadi pola dan kecenderungan. Dari terminologi inilah kemudian makna sekolah tidak diperspektifkan untuk mengkerangkan perkembangan totalitas ke dalam pribadi, dan demi menghayati hidup yang lebih baik, tetapi sekedar untuk memenuhi tuntutan-tuntutan formal administratif-akademis. Dalam istilahnya Ariel Heryanto (dalam Sindhunata [ed.], 2000:35) saat ini telah terjadi apa yang dinamakan dengan industrialisasi pendidikan, yang maknanya teramat sulit untuk diurai, yakni sebagai berkah, tantangan, atau justru bencana bagi Indonesia. Tegastlah disini bahwasannya telah terjadi proses degradasi dan pendangkalan urgensi maknawi/fungsi pendidikan di sekolah.

Lembaga-lembaga pendidikan di era sekarang, dengan demikian berada dalam kerangka modernisasi yang sama dengan lembaga-lembaga lainnya (politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya). Dunia pendidikan saat ini begitu mudah terpengaruh oleh monolitisme rasio modern-kapitalistik, yang menempatkan materi sebagai justifikasi dan kaukus orientasinya. Sehingga wajah dunia pendidikan telah demikian jauh tereduksi maknanya, dari konsep pendidikan sebagai proses humanisasi (Paulo Freire, 1972), menjadi semata-mata persoalan teknis dan administratif, yang tersubordinasikan ke dalam *mainstream* kapitalisme maupun jargon *developmentalisme*. Bukankah ekspansi kapital dan industri telah memaksa institusi-institusi pendidikan menyesuaikan diri dengan kebutuhan 'pasar', yang akibatnya adalah proses pendidikan tidak lagi diselenggarakan dalam nuansa intens yang penuh kedalaman makna (*in depth quality*), melainkan cenderung parsial dan dangkal, semata-mata agar *match* dengan kebutuhan dan instrumen pasar.

Ketika sistem pendidikan kita begitu terkontaminasi oleh pengarusutamaan (*mainstream*) monolitisme rejim modern-kapitalistik, yang telah begitu mengedepankan jargon paradigma *developmentalisme* semata sebagaimana disebut di atas, maka ketika itu pula segala sistem pendidikan yang ada, dinamikanya tak pernah bisa keluar dari kubangan kalkulasi *output* dan *out come-nya* pada soal tingkat keterserapan di pasar kerja semata. Dalam artian, segala daya dan upaya pendidikan kemudian diarahkan sebesar-besarnya bagi assesibilitas dalam pasar kerja, sehingga konsekuensi mahal yang harus

ditebusnya adalah, *concern* terbesar warna pendidikan pun menjadi amat materialistik.

Bidang kajian yang menjanjikan muatan makna yang mendekatkan pada segmentasi pasar, kemudian menjadi primadona dan seolah segala-galanya, dan sebaliknya pendidikan yang berdimensikan kekentalan pada nuansa nilai-nilai menjadi marjinal-negasi. Dari sinilah hulu perihal konsep penomorsatuan IQ (*Intellectual Quotions*) yang kemudian menjadi jargon segala-galanya dalam ekpresi sistem dan kinerja pendidikan menjadi “kegilaan” para *decission maker* dan dan pendidik. Sedangkan pada sisi yang lain, konsep pendidikan pada dimensi EQ (*Emotional Quotions*) “diketepikan”, dan bahkan nyaris dipersepsi tanpa adanya ikon kebermaknaan.

Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa pendidikan yang rentan diperalat dan dibelokkan hanya untuk melayani kepentingan masyarakat semata-mata (dunia kerja misalnya), sebenarnya merupakan tesis kegelisahan sepanjang jaman (Sindhunata, 2001:ix). Memang keliru jika pendidikan tidak berguna sama sekali bagi kepentingan masyarakat. Tapi sangatlah keliru jika pendidikan hanya semata-mata ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat tersebut. Hal ini lebih disebabkan tujuan pendidikan bukanlah pertama-tama melayani masyarakat, melainkan membantu kelahiran manusia-manusia dewasa dan matang, yang kelak dengan bebas dan sadar dapat membantu masyarakatnya. Faure (dalam Sindhunata, 2001:1) juga menegaskan bahwa tujuan pendidikan bukanlah pertama-tama menghasilkan “orang yang berguna” untuk kepentingan masyarakat, melainkan membentuk masyarakat pendidikan, dimana anggota-

anggotanya dapat belajar dan mendidik dirinya sendiri untuk kelak membantu masyarakatnya.

Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi, dan bahkan pendidikan harus mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Namun menurut Daud Jusuf (dalam Sindhunata [ed.], 2001) kita harus menolak tegas jika pendidikan dikebiri dan manusia dimaknai menjadi pelengkap modal saja dalam industri kapitalistik dan semata-mata berorientasi pada pasar kerja.

Lalu bagaimana gambaran pendidikan yang ideal dalam format masyarakat yang sangat kental dengan rejim kapital tersebut. Handrik Berybe (dalam Sindhunata [ed.], 2001) dengan begitu asertif mengungkapkan bahwa jangan jadikan sekolah “embel-embel modernisasi pembangunan”, melainkan justru harus mampu berperan sebagai “katalisator yang pertama dan utama”. Memang idealitas tersebut tidak mudah. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah mau tidak mau terpaksa harus bersinggungan dengan pelbagai kepentingan dan dinamika sosial, yang mana kepentingan-kepentingan tersebut saling berkompetisi dengan merebut pengaruh dalam sekolah.

Oleh karena itu sejenak perlu kita mengingat kembali, kritik tajam Paolo Freire (1972) seorang filsuf besar dalam bidang pendidikan dari Amerika Latin (Brasil) berkaitan dengan sistem dan praksis pendidikan, yakni Freire mengkritik perihal sekolah yang telah menjadi “alat penjinakan” dan manipulasi anak didik agar mereka dapat diperalat untuk melayani kepentingan kelompok yang berkuasa (termasuk dalam hal ini adalah kepentingan ekonomi kapital) tentunya.

Oleh karena itu, bukan sesuatu yang mengada-ada kiranya kemudian Ivan Illich (dalam Sindhunata, 2001:9) mengisyaratkan akan kemungkinan perlunya kita melakukan "de-sekolah-isasi masyarakat", ketika praksis pendidikan ternyata hanya menghasilkan *quo vadis*.

Alternatif Oasis Pendidikan Nilai

Keberadaan dan kebermaknaan kecerdasan emosional atau kecerdasan rasa (*emotional quotient*) yang ternyata jauh lebih signifikan manakala dibandingkan dengan kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*) dalam sumbangannya untuk mengkonstruksi kualitas manusia dalam totalitas habitat sosialnya, bukanlah merupakan tesis dan wacana yang asing, dalam kaitannya dengan dunia pendidikan di saat ini. Perihal pentingnya *emotional intelligence*, yang diantaranya dikemukakan oleh Daniel Goleman, Ph.D dari Harvard University melalui hasil *action research* yang panjang, kita diyakinkan akan betapa pentingnya kecerdasan emosi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam meraih prestasi dan karir (dalam Sumarta, 2000:182).

Namun, jauh sebelum Goleman melakukan penelitiannya itu, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara (1967) bahkan sudah menjadikan unsur rasa sebagai poros trilogi pendidikan dalam bentangan pikir (cipta)-rasa-karsa. Ki Hadjar Dewantara secara intens menekankan pentingnya olah rasa di samping olah pikir dan olah raga. Melalui olah rasa inilah akan memekarkan sensitivitas hingga terbentuk manusia-manusia yang berwatak mulia seperti: terintegrasinya antara pikir, kata, dan laku, sikap jujur, rendah hati, disiplin, setia,

menahan diri, bertenggang rasa, penuh perhatian, belas kasih, berani, adil, terbuka, dan sebagainya.

Adapun poros dari pendidikan bagi kecerdasan emosional/rasa dimaksud, menurut pendapat para pakar, di antaranya: Ki Hajar dewantara (1967), Read (1970), Ross (1983) adalah banyak tersembunyi dalam pesan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai moral dan humanitarian. Oleh karenanya proses internalisasi atau pengakaran, pengasahan, dan pemekaran rasa seyogyanya menjadi *concern* sejak pendidikan di tingkat dini.

Ketika pendidikan moral dan nilai-nilai yang tersaji dalam format pendidikan agama baik formal maupun informal, ternyata dalam ekspresinya berkecenderungan lebih mengedepankan pengasahan aspek kognitif dan bukannya penajaman dan penghayatan pada dimensi *religiousitas*, maka sesungguhnya nilai-nilai yang termuat dalam pendidikan yang berbasis seni dan sastra merupakan salah satu alternatif oasis. Sayangnya selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian yang besar dalam sistem pendidikan formal kita, karena para *decission maker* pendidikan kita sampai saat ini begitu *gandrung* dengan ranah pendidikan yang berbasis kemampuan intelektual semata sebagaimana dimaksud di atas.

Pada akhirnya masalah pendidikan seni dan sastra terasa “diketepikan” - digeser dan teralienasi. Masalah pendidikan seni dan sastra mereka pandang sebagai masalah yang relatif tidak penting. Satu segmentasi di ranah pendidikan yang selalu dianggap sebagai suatu *non-issue*, suatu hal yang amat remeh maknanya. Padahal sudah teramat banyak penajaman para pakar yang mencoba

mengartikulasikan perihal pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam segmentasi pendidikan seni, sastra, dan humaniora tersebut bagi kehidupan secara totalitas.

Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara (dalam Sumarta, 2000), bingkai bidang pendidikan seni yang berbasis pada pengakaran poros rasa estetis, sekali-kali tidak bermaknakan agar anak didiknya nanti menjadi seniman atau seorang ahli seni. Namun tujuan esensial kulturalnya adalah *“dengan pendidikan menghaluskan perasaan, anak-anak kita hendaknya mendapatkan kecerdasan yang luas dan sempurna dari rohnya, jiwanya, budinya, hingga mereka hendaknya mendapatkan tingkatan yang luhur sebagai manusia (mempertinggi niveau human)”*, begitu tulisnya dalam pidato radio *Hubungan Pendidikan dan Kultur* di RRI Yogyakarta, 14 Januari 1940 (dalam Sumarta, 2000).

Penajaman pada dimensi operasional perihal efektivitas pendidikan yang berporoskan pengakaran dan pemekaran rasa ini, kiranya sudah banyak hasil riset komprehensif yang mampu memverifikasikannya. Dalam bidang seni musik misalnya, hasil riset yang ada, ternyata musik-musik yang sejenis klasik seperti karya Wolfgang Amadeus *Mozart* (1756-1791), jika diperdengarkan secara intensif kepada ibu yang sedang mengandung janinnya, mampu mempengaruhi pembentukan kejiwaan sang anak nantinya (Sumarta, 2000).

Pendidikan seni yang pada hakekatnya merupakan pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman apresiasi estetis, disamping mampu memberikan dorongan ber-*“ekstasi”* lewat seni, juga memberi alternatif pengembangan potensi psikhis diri serta dapat berperan sebagai katarsis jiwa

yang membebaskan. Ross (1983) mengungkapkan bahwa kurikulum pendidikan seni termasuk kurikulum *humanistic* yang mengutamakan pembinaan kemanusiaan, bukan kurikulum sosial yang mengutamakan hasil praktis. Sedangkan menurut Read (1970) pendidikan seni lebih berdimensikan sebagai “media pendidikan” yang memberikan serangkaian pengalaman estetik yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan jiwa individu. Sebab melalui pendidikan ini akan diperoleh internalisasi pengalaman estetik yang berfungsi melatih kepekaan rasa yang tinggi. Dengan kepekaan rasa yang tinggi inilah nantinya mental anak mudah untuk diisi dengan nilai-nilai *religiousitas*, budi pekerti atau jenis yang lain. Istilah lain dari konsep “kearifan”. Definisi dan pemaknaan “kearifan” diperlukan syarat-syarat: pengetahuan yang luas (*to be learned*), kecerdikan (*smartness*), akal sehat (*common sense*), tilikan (*insight*), yaitu mengenali inti dari hal-hal yang diketahui, sikap hati-hati (*providence, discrete*), pemahaman terhadap norma-norma dan kebenaran, dan kemampuan mencernakan (*to digest*) pengalaman hidup (Buchori, 2000:25). Semua nilai-nilai itu terkandung dengan sarat dalam dimensi pendidikan seni, karena berorientasi pada penekanan proses pengalaman olah rasa dan estetis.

Sedangkan dalam bidang sastra, duapuluh tahun yang lalu di Inggris, Terry Eagleton (dalam Purbani, 2000) sudah mencanangkan sastra sebagai *moral technology*, media yang efektif untuk mendidik manusia menjadi *sensible*. Bahkan berpuluh-puluh tahun sebelumnya, para pakar dan penyair semacam Leavis (dalam Purbani, 2000) telah melihat dan memaknai sastra sebagai *torch*, lentera penerang kehidupan yang memiliki kedudukan yang nyaris setara dengan *the*

holly books. Sastra adalah andalan pendidikan moral manusia, karena dipercaya mengandung nilai-nilai ajaran budi luhur dan ideologi moral, nyaris setara dengan ajaran agama, yang mampu menjadikan manusia benar-benar *sensible*. Tugas moral teknologi melalui sastra, justru bukan karena nilai moral A atau B yang menjadi kandungan sastra tertentu ini yang ditargetkan diserap oleh anak didik, melainkan memproduksi subyek manusia menjadi sensitif, imajinatif, simpatik, kreatif, perspektif, reflektif, skeptis, dan sebagainya, mengenai nilai-nilai kehidupan apa pun, termasuk nilai-nilai *religiousitas* tadi.

Karena sastra menempatkan bahasa sebagai situs konflik nilai, maka sensibilitas sebagaimana dimaksud, juga diharapkan mengarah kepada pembangunan kepekaan anak didik terhadap berbagai potensi ganda bahasa. Dalam artian anak didik perlu diberikan pemahaman yang komprehensif, bahwasannya bahasa itu dapat berperan yang kompleks, yakni mampu untuk memprovokasi, memerangkap, menghibur, atau menerangi pemikiran manusia. Model pendidikan sastra yang demikian diharapkan dapat dikenalkan kepada anak-anak sedini mungkin, sehingga tidak terjebak pada makna pendidikan sastra tak lebih dari wacana pendidikan kognitif semata.

Demikian juga halnya dengan pendidikan sosial humaniora lainnya, dalam artian muatan dan substansial nilai-nilai di dalamnya merupakan satu alternatif bagi kemungkinan berperan sebagai *moral technology* sesudah pendidikan agama.

Pada dataran tertentu, semua itu diharapkan mampu sebagai salah satu *outlet* efektif guna menghadirkan wacana pendidikan yang lebih manusiawi, yang mampu memproduksi manusia sebagai *out put* maupun *out come* sistem pendidikan

di masyarakat, yang tak lebih sekedar dari makna yang tak jauh sebagai *mur*, *baut*, *sekrup*, atau istilah lain, yang identik dengan makna terminologi korban (*victim*) mesin kapital. Karenanya pendidikan yang memahami wacana kemaunisaan, atau dalam istilah lain adalah pengembangan “pendidikan kemanusiaan” kiranya merupakan alternatif *outlet* bagi keberdayaan bangsa ini (A. Waidl dalam Atmadi dan Setyaningsih, 2000).

Penutup

Sebagai catatan epilog, sekali lagi perihal carut marutnya sistem pranata sosial yang jauh dari maknawi peradaban, sebagaimana yang kental terekspresi dalam kesadaran penuh keseharian kita ini, tidak terlalu salah manakala ikon pengharapan terbesar yang mampu mensolusikannya adalah melalui dimensi pendidikan. Karenanya kritik terhadap sistem dan praksis pendidikan selama ini yang begitu mendewakan pengembangan pribadi pada segmentasi kecerdasan olah pikir dan intelegensi (IQ) semata, sudah seyogyanya diupayakan bangunan kesadaran baru bersama, bahwa hal itu ternyata bukan segala-galanya.

Pendidikan yang berbasiskan optimasi pengembangan kecerdasan rasa atau emosional (EQ), yang sudah sejak lama memberikan bukti sah bagi kebermaknaannya yang jauh lebih signifikan bagi individu dalam semesta sosialnya, kiranya sudah saatnya dapat diartikulasikan lebih proporsional-komprehensif dalam praksis kinerja pendidikan kita saat ini.

Oleh karena itu, sudah selayaknya pula jika ketika gagasan reformasi pendidikan yang ada, sebagaimana yang begitu menjadi *concern* di saat ini, maka unsur pendidikan nilai yang berbasiskan senidan sastra, dikerangkakan dalam

sistem pendidikan nasional secara *equilibrium* dengan bidang kajian lainnya yang berbasiskan iptek. Pada akhirnya akan dapat digambarkan harapan idealita kesetimbangan kualitas manusia utuh sebagai *out put* dan *out come* di masyarakat nantinya, dan bukannya kecenderungan *output* dari paradigma pendidikan kini, yakni membuahakan generasi yang berotak kiri besar dan berhati (berotak kanan) kerdil.

Begitulah, persoalan yang menghadang dunia pendidikan kita rasanya memang sangat kompleks dan begitu menggurita. Mungkin itu pula salah satu sebab mengapa sektor ini relatif paling terbelakang dalam mengikuti derap langkah reformasi. Maka, mengakhiri tulisan ini, baiklah kita renungkan kata-kata bijak filsuf Kuan Tsu (dalam Supratiknya dan Samana, 2000) berikut ini:

*Jika Anda hanya memprihatinkan keadaan setahun mendatang,
cukuplah Anda taburkan benih,
jika Anda memprihatinkan keadaan sepuluh tahun mendatang,
tanamlah sebatang pohon,
dan, jika Anda memprihatinkan keadaan seratus tahun mendatang,
berikanlah pendidikan yang benar kepada rakyat.*

Jika tidak, maka pendidikan tidak akan pernah mampu berperan sebagai jembatan terefektif bagi bulir-bulir ihtiar “pemanusiaan manusia” dalam format pemberdayaan (*empowerment*) serta pencerahan (*enlightment*), sebagaimana sejak awal idealita yang diharapkan dan jangan sampai justru berlaku sebaliknya, pendidikan sebagai *poison and bar of the prison* – racun dan penjara - bagi masyarakat, kebudayaan, serta peradabannya sendiri. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimassana, YB. 2000. Revitalisasi Pendidikan Nilai di Dalam Sektor Pendidikan Formal. Dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (Eds.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Berybe, Hendrik. 2001. Dilema Pelembagaan Pendidikan. Dalam Sindhunata (ed.), *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Buchori, Mochtar. 2000. Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya politik di Indonesia. Dalam Sindhunata (Ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dayati, Umi. 1999. Aplikasi Gender di Sekolah TK dan SD. *Makalah Seminar dan Pelatihan Gender Bagi Guru TK dan SD di Malang*. Malang: Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian IKIP Malang.
- Dewantara, Ki Hajar. 1967. *Kebudayaan: Bagian IIA*. Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Faure, Edgar. 2001. Pendidikan dan Hari Depan Umat Manusia. Dalam Sindhunata (ed.), *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Freire, Paulo. 1973. *Pedagogy of the Oppressed*. London: Penguin Books (tr. Myra Bergman Ramos).
- Heryanto, Ariel. 2000. Industrialisasi Pendidikan: Berkah, Tantangan, atau Bencana bagi Indonesia? Dalam Sindhunata (Ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jusuf, Daud. 2001. Dua Pendekatan dalam Mempolakan Pendidikan. Dalam Sindhunata (ed.), *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Purbani, Widyastuti. 2000, 3 Mei. Mendiskusikan Pendidikan Pemanusiaan. *Kedaulatan Rakyat*, hlm. 4.
- Read, Herbert. 1970. *Education Through Art*. New York: Faber and Faber Culture Macmillan.
- Ross, Malcom. 1983. *The Aesthetic Impuls*. Oxford: Pergamon Press.

- Sudarminta, J. 2000. Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga. Dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (Eds.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumarta, I Ketut. Pendidikan yang Memekarkan Rasa. Dalam Sindhunata (Ed.), *Membuka Masa Depan Anak-anak Kita: Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.